

**PERAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI ERA OTONOMI DAERAH**

Disampaikan oleh

Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S.

**Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-22 Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta
di Sasana Krida Kusuma (Gedung Wanita) Surakarta, Sabtu 20 Agustus 2005**

**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
(UNIBA)**

**PERAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI ERA OTONOMI DAERAH ¹⁾**
Ravik Karsidi ²⁾

I. Pendahuluan

Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial.

Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini, baik ditingkat nasional maupun lokal. Salah satu peran tri dharma yang strategis dapat diambil oleh Perguruan Tinggi adalah membantu pengembangan sumberdaya manusia UMKM di Indonesia.

Semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1997, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja.

Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 triliun (56,7% dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 2005).

Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di negara-negara maju pada saat-saat negara tersebut membangun kemajuan perkonomiannya sampai sekarang. Kondisi demikian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *microfinance International*. Hal ini dimaksudkan tidak saja untuk menunjukkan keberpihakan badan dunia tersebut terhadap UMKM namun juga dalam kerangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian pada pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan berbagai stimulan dan fasilitasi.

¹⁾ Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-22 Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, di Sasana Krida Kusuma (Gedung Wanita) Surakarta, Sabtu 20 Agustus 2005.

²⁾ Guru Besar Sosiologi Pendidikan FKIP UNS, Pembantu Rektor I UNS, Staf Pengajar dan Pengasuh Program Studi S2 Manajemen Pengembangan Masyarakat Program Pascasarjana UNS.

Sejalan dengan program PBB ini, pemerintah Indonesia menetapkan tahun 2005 sebagai “**Tahun UMKM Indonesia**” dengan melakukan berbagai instrumen dan program fasilitasi pengembangan UMKM di tingkat nasional, sedang di daerah diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tulisan ini bermaksud menyajikan uraian tentang (1) penyelenggaraan otonomi daerah (kendala, dampak dan tantangannya) dan (2) dinamika keterlibatan Perguruan Tinggi (baik sebagai *stakeholder* UMKM, hubungan peran dengan *stakeholder* UMKM yang lain, dan strategi pemberdayaan Sumberdaya UMKM) di masa otonomi daerah.

II. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Tap MPR RI No. XV/1998 terdapat beberapa hal penting dalam ketetapan ini antara lain berisi:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan prinsip demokratisasi dan keadilan
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara proporsional, yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Dari aspek penguatan keuangan daerah, otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan daerah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR RI tersebut, telah dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti UU No. 5 Tahun 1974. UU ini secara substansial mengamanatkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Basis otonomi daerah tersebut adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota yang didasarkan pada azas desentralisasi. Adapun daerah propinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administrasi yang mencakup lintas daerah kabupaten dan daerah kota.

Munculnya harapan akan adanya penyelenggaraan otonomi yang lebih baik tersebut juga didukung oleh adanya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Dalam pendidikan dan pengembangan Sumberdaya Manusia sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka telah menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya

sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan sumberdaya manusia) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Apabila dilihat maksud yang ingin dicapai dengan otonomi daerah yaitu menggali potensi yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Perguruan Tinggi secara langsung mempunyai peranan yang besar dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan adanya tantangan globalisasi yang sangat luas, dimana keduanya bagi masyarakat memerlukan untuk menyesuakannya. Keduanya membawa dampak dan konsekuensi. Namun, hal-hal tersebut dalam penerapan otonomi daerah juga dikenali adanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secara kelembagaan.

Beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah (Anwar, 2000), misalnya :

1. Belum terdapat persepsi yang seragam tentang penerapan otonomi daerah, diantara instansi pusat maupun daerah.
2. Tingkat kemampuan daerah sebagian masih jauh dari yang diharapkan, yang terutama kemampuan keuangan daerah selama ini masih cenderung “tergantung” pada pemerintahan pusat.
3. Sumberdaya aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang masih rendah yang belum sepenuhnya menunjang terlaksananya otonomi daerah.

Daerah-daerah yang sumber pendapatan asli daerahnya sangat rendah, sumberdaya alam masih belum terolah atau tidak potensial harus mencari jalan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerahnya. Pengembangan sumberdaya manusia adalah salah satu yang harus dikembangkan sebagai aset daerah.

Saat diberlakukannya otonomi daerah yang bersamaan dengan adanya desakan arus globalisasi bagi masyarakat (terutama di bidang sosial ekonomi) telah menimbulkan beberapa tantangan:

1. Berbagai produk akan menghadapi persaingan yang sengit dengan produk yang datang dari luar. Bagi semua hasil produksi termasuk dari pertanian, industri mikro dan keluarga tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan daya saing produk. Dalam posisi Sumberdaya Manusia rendah kualitas dan teknologi yang tidak tepat, maka akan kalah bersaing.
2. Arus globalisasi akan mengundang semakin terbukanya peluang investasi asing, sehingga perusahaan domestik harus bersaing dengan usaha asing di negerinya sendiri.
3. Adanya arus globalisasi, maka berbagai bentuk perlindungan bagi sekelompok pelaku ekonomi, apapun alasannya tidak dibenarkan lagi.
4. Adanya tekanan kompetisi akan menyebabkan pengusaha mencari peluang upah buruh semurah-murahnya.

Dengan kata lain sebenarnya adanya globalisasi, kita tidak dapat mundur atau menghindarinya karena komitmen sudah diberikan. Masalahnya adalah bagaimana “tanda-tanda peringatan” harus diberikan/diketahui, agar masyarakat kita dapat ikut bisa menjadi pemain yang menang, dan bukan sekedar penonton atau bahkan menjadi korban arus globalisasi tersebut

III. Dinamika Keterlibatan Perguruan Tinggi

A. Stakeholder UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Semua peran dan keterlibatan *stakeholder* UMKM berkembang sesuai dengan cara pandang mereka dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Adapun keterlibatan *stakeholder* UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pemberdayaan sumberdaya manusia UMKM yang sudah terjadi dan banyak dilakukan selama ini, dapat diidentifikasi seperti tertera pada tabel 1. Keterlibatan tersebut masih sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain.

Tabel. 1. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemberdayaan SDM UMKM dari berbagai Instansi terkait (*Stakeholder*)

No.	Kebutuhan Pembelajaran	Keadaan Sekarang	
		Instansi	Spesifikasi Pelayanan
1.	Kemampuan Teknologi	- Disperindagkop dan PKM - Perguruan Tinggi - LSM - Sek. Kejuruan, Disnaker	- Pelatihan - Pembinaan - Pengabdian Masyarakat - Bimbingan usaha - Pelatihan - Kursus - Magang
2.	Pengetahuan Permodalan	Disperindagkop dan PKM	- Pembinaan - Pelatihan
3.	Pengetahuan Pemasaran	Disperindagkop dan PKM	- Pembinaan organisasi - Pendaftaran - Perizinan - Pembinaan niaga - Kemitraan - Pembinaan koperasi
4.	Peningkatan Kreativitas	-	Secara khusus belum ada
5.	Peningkatan Prakarsa	-	Secara khusus belum ada
6.	Peningkatan Keuletan berusaha	-	Secara khusus belum ada
7.	Peningkatan Keberanian Berisiko	-	Secara khusus belum ada
8.	Peningkatan Kewirausahaan	- Disperindagkop dan PKM - Perguruan Tinggi - LSM - Disnaker	Pelatihan-pelatihan
9.	Layanan Permodalan	- Perbankan - BUMN	Promosi Pinjaman terkait proyek

Sumber: Karsidi, 2003

Berikut diajukan pola alternatif hubungan antar peran masing-masing *stakeholder* UMKM (Karsidi dan Irianto, 2005) yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UMKM:

1. UMKM

UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat penting (pemegang kunci) dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendampingan pula.

2. Kelompok/Koperasi

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi risiko dan mudah dalam pembinaannya. Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku maupun penjualan produk. Demikian pula dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi lembaga koperasi dapat dinikmati oleh para anggotanya.

3. Asosiasi Usaha

Asosiasi Usaha dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek bagi anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun sistem pembayaran dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

4. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankan terhadap UMKM, salah satunya dengan pendekatan melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap UMKM. Adanya pendekatan kelompok tidak akan efektif jika pandangan Bank terhadap UMKM masih menggunakan paradigma lama bahwa kredit terhadap UMKM tidak ekonomis dan berisiko.

Untuk itu perlu menggunakan paradigma baru, dimana UMKM harus dipandang tidak saja sebagai pemanfaat kredit namun juga sebagai sumber potensial tabungan. Secara lengkap perbandingan paradigma bank terhadap UMKM disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Perbankan terhadap UMKM

No	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1.	Mereka tidak punya potensi menabung	Mereka mempunyai potensi menabung
2.	Mereka akan aktif mendatangi bank	Bank perlu aktif menjemput bola
3.	Mereka memerlukan kredit murah	Mereka membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/pelayanan Bank
4.	Perlu dana murah dari pemerintah untuk kredit	Bank perlu meningkatkan upaya mobilisasi tabungan
5.	Biaya pelayanan keuangan tinggi	Biaya dapat ditekan dengan pendekatan kelompok
6.	Kredit kepada mereka berisiko tinggi	Risiko dapat ditekan dengan pendekatan kelompok

Dengan pendekatan kelompok diharapkan memudahkan dalam pengelolaan kredit dan dapat menekan risiko sehingga secara keseluruhan menjadi layanan kredit yang ekonomis. Selain itu untuk membantu mengurangi risiko kredit macet, Bank dapat melakukan pendampingan usaha bagi kelompok UMKM yang mengambil kredit pada Bank yang bersangkutan. Pendekatan ini memang ini butuh waktu dan pemikiran lebih, sehingga untuk meringankan risiko dapat bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), yaitu model konsultan keuangan yang sekarang banyak didorong untuk berkembang dalam rangka memfasilitasi akses UMKM terhadap permodalan.

5. Pasar

Pasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa pasar dalam negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku UMKM dan pelaku pasar (pembeli maupun eksportir) perlu dijaga kesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi pasar harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun Asosiasi usaha.

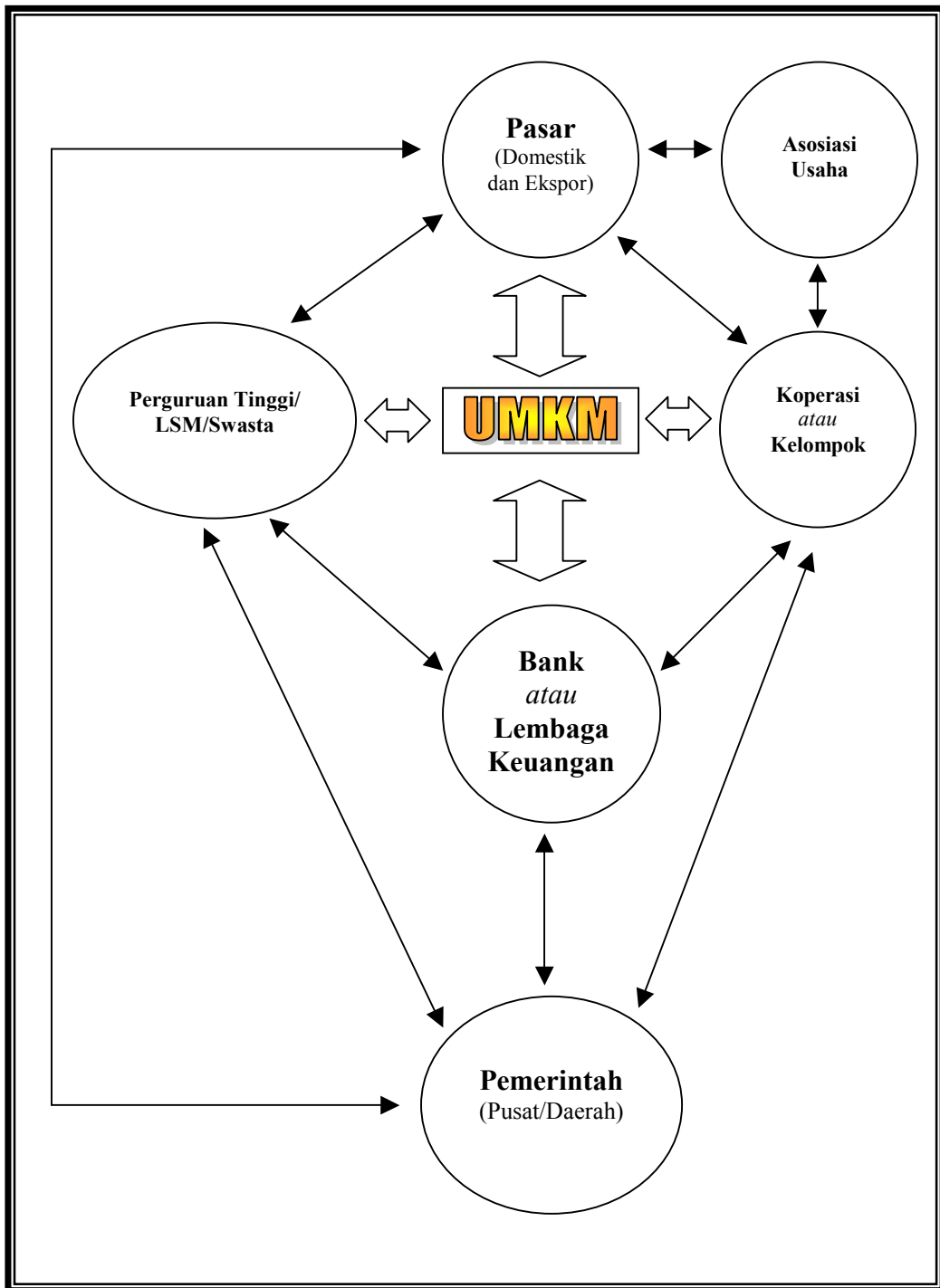
6. Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM maupun lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti koperasi, Asosiasi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Keuangan, dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha UMKM itu sendiri.

7. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, yaitu: manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Idealnya jasa layanan yang diberikan Perguruan Tinggi harus dapat ditanggung pembiayaan oleh UMKM sendiri, namun sampai saat ini belum banyak UMKM yang menanggung atas jasa yang diterimanya.

Hubungan peranan antar unsur terkait (*Stakeholder*) dalam Pengembangan UMKM di atas dapat dilukiskan seperti dalam gambar berikut:



Gambar 1
Hubungan Keterkaitan Peran antar *Stakeholder* UMKM

B. Strategi Pemberdayaan UMKM

Korten (1980; 1984), mengatakan bahwa titik pusat perhatian masa pasca industri adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih *berpihak kepada rakyat*. Individu bukanlah sebagai objek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Oleh karena itu, maka pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya. Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi.

Inilah awal mula pijakan bahwa pemberdayaan bagi masyarakat sangatlah penting (termasuk UMKM), walaupun hal ini menurut Wirutomo, dkk (2003) disebut sebagai suatu konteks pemecahan masalah ketegangan hubungan antar negara (*state*) dengan masyarakat (*community*) yaitu untuk menggeser tanggungjawab negara dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat. Hal tersebut menurutnya hanya bisa apabila didukung oleh kelembagaan lokal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan.

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode "*bottom up*", dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi Potensi
2. Analisis Kebutuhan
3. Rencana Kerja Bersama
4. Pelaksanaan Program Kerja Bersama
5. Monitoring dan Evaluasi.

Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumberdaya Manusia (SDM) UMKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan Sumberdaya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal usaha pengrajin. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayahnya masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan *stakeholder* UMKM dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.

Analisis kebutuhan, tahapan analisis ini dilakukan oleh perwakilan UMKM yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan pengrajin selaku individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pengrajin dan kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.

Rencana program kerja bersama, setelah kebutuhan dapat ditentukan maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator.

Pelaksanaan program kerja bersama, jikalau program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi/LSM/Swasta dapat bertindak selaku pemberi jasa konsultansi. Sebagai konsultan, idealnya Perguruan Tinggi harus mendapatkan jasa dari layanan yang diberikan kepada UMKM.

Kebutuhan akan permodalan UMKM salah satunya dapat dipenuhi dengan memperankan fungsi fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi pengrajin maupun kelompok. KKMB ini lahir sebagai perubahan paradigma baru terhadap UMKM dari perbankan (*lihat tabel 2*), bahwa:

1. UMKM mempunyai potensi menabung
2. Bank perlu aktif menjemput Bola
3. UMKM membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/layanan perbankan
4. Bank perlu memobilisasi tabungan dari UMKM
5. Biaya dapat ditekan melalui pendekatan kelompok
6. Risiko dapat ditekan melalui pendekatan kelompok

Selain Bank memberikan kredit sebagai tugas utamanya, Bank dapat membantu UMKM dengan memberikan pendampingan (*Technical Assistant/TA*) baik dilakukan oleh Bank sendiri atau bekerjasama dengan pendamping yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta.

Monitoring dan evaluasi, berfungsi tidak saja untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyusunan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

C. Agenda Kegiatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan UMKM

Peran Perguruan Tinggi (selain melakukan pengajaran *reguler konvensional*) dalam era otonomi daerah harus mampu melakukan upaya-upaya strategis yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui:

1. Mengembangkan model pembangunan (khususnya untuk pengembangan UMKM) yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan sumberdaya lokal.
2. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat UMKM dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis.
3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.
4. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tentang UMKM tersebut.

5. Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
6. Menyebarluaskan (*dissemination*) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi UMKM melalui berbagai cara (*public education*) agar kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era otonomi daerah.

Adapun beberapa agenda praktis pengembangan sumberdaya manusia UMKM (LPPM UNS, 2005) yang dapat segera dilakukan Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Pengembangan Desain dan Standarisasi Kualitas

Desain merupakan salah satu kegiatan pokok yang juga harus mendapatkan perhatian dalam kegiatan pengembangan UMKM. Bagaimana menekankan pentingnya suatu inovasi baru dalam produk. Masalah lain yang dihadapi oleh UMKM terutama *home industry* adalah kurang adanya standar kualitas yang jelas dalam pembuatan produk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan atau konsumen sehingga di kemudian hari juga akan berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan.

Untuk itu bagi UMKM pengembangan desain dan standarisasi kualitas terus menjadi prioritas program. Kegiatan pengembangan desain, meliputi:

- a. Penelitian mengenai barang yang sedang digemari di masyarakat atau pangsa pasar yang ada untuk melihat aspek ekonomis dari barang yang akan dibuat. Sehingga desain yang dibuat bisa *up to date*.
 - b. Ujicoba dan praktek, untuk bisa membuat desain yang menarik, mudah diaplikasikan dan lebih *marketable*.
 - c. Kunjungan atau studi banding pada industri atau sentra sejenis untuk peningkatan kemitraan, pengembangan keilmuan serta peningkatan wawasan.
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan desain, standarisasi mutu serta pengembangan budaya kewirausahaan.
2. Pelaksanaan dan Aplikasi kepada Masyarakat Warga Belajar

Setelah proses pengembangan desain, maka perlu dilakukan pelaksanaan dan aplikasi kepada masyarakat warga belajar. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan aplikasi meliputi:

- a. Pemilihan warga belajar
 - b. Kriteria warga belajar
 - c. Jenis dan program pembelajaran
- Beberapa topik pelatihan yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, meliputi:
- 1) Kebijakan pemberdayaan UMKM, meliputi: kebijakan umum, permodalan, dan perijinan.
 - 2) Manajemen UMKM, meliputi: organisasi, legalitas usaha, pemasaran, keuangan, dan produksi/operasi.
 - 3) Kewirausahaan, meliputi: studi perencanaan usaha, studi kelayakan usaha, dan teknik pengambilan keputusan.
 - 4) Teknik pemilihan bahan baku, pemilihan limbah baik kayu, perca maupun kaca yang masih bisa dimanfaatkan untuk produksi.
 - 5) Teknik produksi, meliputi: desain, pembuatan mal, dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan serta inovasi dari produk.

- 6) Teknik *finishing*
 - 7) Teknik pembukuan, berisi mengenai akuntansi sederhana dan praktis.
 - 8) Etika bisnis
 - 9) Teknik negosiasi
 - 10) Motivasi berprestasi
 - 11) Komunikasi
 - 12) Kepemimpinan
 - 13) Informasi teknologi
3. Pembukaan *Training Centre* dan *Show Room* Hasil Kerajinan
- Aspek yang tidak kalah penting dalam peran Perguruan Tinggi ini adalah pembentukan *training centre* sebagai kelanjutan program yang sudah dilaksanakan. Pembuatan *training centre* mempunyai tujuan sebagai pengembangan model-model selanjutnya dalam pemanfaatan limbah bagi pengembangan usaha produktif. Kegiatan yang dilakukan dalam *training centre* meliputi:
- a. Konsultasi dan layanan pengembangan bisnis
 - b. Pengembangan desain dan kendali mutu
 - c. Pematenan dan haki
 - d. Pendampingan dan pembinaan secara periodik

V. Penutup

Dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia dapat dilakukan dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Fungsi Perguruan Tinggi (selain untuk pengajaran *reguler konvensional*) dalam era otonomi daerah harus mampu melakukan upaya-upaya yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional untuk pengembangan UMKM. Bentuk operasional dari Perguruan Tinggi adalah sebagai *stakeholder* UMKM yang berperan aktif dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kerjasama antar *stakeholder* akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan UMKM. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan UMKM baik yang bersifat *technical assistant* (TA) maupun non TA harus diupayakan adanya koordinasi antar *stakeholder* agar optimal hasilnya.

Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan untuk pengembangan UMKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi/permodalan saja, namun harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok.

Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat *bottom up*, maka secara integral akan dapat memberikan dampak meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan mutu UMKM dalam menyongsong otonomi daerah. Semoga (rk)

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Surya. 2000. *“Kontribusi Penyuluhan Pembangunan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”* Seminar Pemberdayaan SDM Menuju Masyarakat Madani, Bogor: IPB. 25-26 September 2000.
- BDS LPPM UNS. 2005. *Pasar Keuangan Mikro. Pelatihan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Bagi Bank Umum*. Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri.
- , 2005. *Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)*. Kerjasama LPPM UNS dengan BI Solo.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (ed). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta.
- Karsidi, Ravik. 2003. *Dari Petani Ke Pengrajin (Sebuah Studi Transformasi Pekerjaan)*. Kerjasama LPM UNS dengan Pustaka Caraka Surakarta.
- , dan Heru Irianto. 2005. *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah. Solo 30 Juni 2005.
- Korten, David C., 1980, *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach*, Public Administration Review, September/October 1980 p.480-509.
- , 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- LPPM UNS. 2005. *Pemanfaatan Limbah Menjadi Barang-Barang Kerajinan dan Home Industri yang Bernilai Ekonomis bagi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Undang-Undang No.25 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Bandung: Penerbit Kuraiko Pratama.
- Wirutomo, Paulus, dkk. 2003. *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah. (Memanusiakan Manusia)*. Jakarta: Penerbit CV. Cipruy.